

## **ABSTRACT**

*Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information requires every public body to explore the public's rights to public information, and the website as the most commonly used media to overcome public information disclosure (KIP). This study aims to describe the tendency of the application of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure on the official website of the Regency / City of West Nusa Tenggara, which consists of 9 Regencies / Cities, using quantitative methods, using the practice theory of PR Grunig and Hunt. Mapping Indicator Modeling Results The Public Information Openness Category is West Lombok Regency reaching 100%, North Lombok Regency 92.3%, East Lombok Regency 92.3%, Bima City 92.3%, Sumbawa Regency 84.61%, Central Lombok Regency 84.61%, Dompu Regency 84.61%, West Sumbawa Regency 84.61%, and Mataram City 84.61%. The website for the Regency/city existence category, fulfillment of the highest indicators is West Lombok Regency reaching 100%, North Lombok Regency 100%, Sumbawa Regency 100%, Mataram City 100%, Bima City 100%, Central Lombok Regency 83.33%, Dompu Regency 83.33%, West Sumbawa Regency 83.33%, and the lowest East Lombok Regency 66.66%. And on the website of the Regency/City of West Nusa Tenggara there are still deficiencies in the categories of information needed, and information needed at all times, and existence.*

**Keywords:** *Public Information, KIP Law, Transparency, website.*

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

## ABSTRAK

Undang-Undang NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik, dan website sebagai media yang paling umum di gunakan untuk implementasi keterbukaan informasi publik (KIP). Penelitian ini bertujuan tujuan ingin mendeskripsikan kecenderungan penerapan UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada website resmi Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan teori praktek PR Grunig dan Hunt. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan indikator tertinggi kategori keterbukaan informasi publik adalah Kabupaten Lombok Barat mencapai 100%, Kabupaten Lombok Utara 92,3%, Kabupaten Lombok Timur 92,3%, Kota Bima 92,3%, Kabupaten Sumbawa 84,61%, Kabupaten Lombok Tengah 84,61%, Kabupaten Dompu 84,61%, Kabupaten Sumbawa Barat 84,61%, dan Kota Mataram 84,61%. Sedangkan penerapan kategori eksistensi website kabupaten/kota, pemenuhan indikator tertinggi adalah Kabupaten Lombok Barat mencapai 100%, Kabupaten Lombok Utara 100%, Kabupaten Sumbawa 100%, Kota Mataram 100%, Kota Bima 100%, Kabupaten Lombok Tengah 83,33%, Kabupaten Dompu 83,33%, Kabupaten Sumbawa Barat 83,33%, dan terendah Kabupaten Lombok Timur 66,66%. Dan dalam website Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat masih terdapat kekurangan pada kategori Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan eksistensi.

**Kata kunci:** Informasi Publik, UU KIP, Transparansi, website.

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA